

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Kemiskinan

###### a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana perseorangan atau kelompok tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Terjadinya kemiskinan dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau kesulitan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan.<sup>1</sup>

Menurut definisi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau (Bappenas), kemiskinan mencakup keadaan di mana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi hak-hak dasar mereka, termasuk kebutuhan makanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, air bersih, tanah & sumber daya alam, serta lingkungan yang aman. Hal ini juga melibatkan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.<sup>2</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin secara mutlak mencerminkan sejauh mana mereka mengalami marginalisasi dalam proses pembangunan.<sup>3</sup>

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Eks Karesidenan Kedu. Hal ini erat kaitannya dengan beberapa faktor, seperti disparitas pendapatan, tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas, kurangnya akses pendidikan, ketidaksetaraan, dan isu sosial lainnya. Oleh karena itu, isu kemiskinan selalu menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan di berbagai daerah. Keberhasilan

---

<sup>1</sup> Nilda Susilawati, "Program Menggunakan Model *Center of Islamic Business and Economic Studies (Cibest)*", *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no 2 (2018): 91–117.

<sup>2</sup> 'Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS)', 2023.

<sup>3</sup> 'Badan Pusat Statistika (BPS)', 2023.

pembangunan dan kepemimpinan sering diukur dari kemampuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di suatu wilayah.<sup>4</sup>

Kemiskinan saat ini dianggap sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi hak-hak dasar mereka dengan layak untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai masalah ekonomi semata, melainkan juga sebagai kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar individu atau kelompok untuk menjalani kehidupan sosial yang pantas. Kemiskinan tidak hanya mencakup kekurangan dalam kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga melibatkan kendala dalam akses terhadap sumber daya dan *asset* yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang layak, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, teknologi informasi, dan modal.

## b. Teori Kemiskinan

### Teori Lingkaran Setan Kemiskinan<sup>5</sup>

Pada tahun 1953, Ragnar Nurkse mengembangkan konsep lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*). Menurutnya, kemiskinan muncul akibat keterbelakangan manusia dan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam sangat bergantung pada produktivitas manusia. Jika banyak penduduk miskin dengan tingkat pendidikan rendah, hal ini dapat menyebabkan kekurangan dalam keterampilan teknis, pengetahuan, dan aktivitas kewirausahaan. Dampaknya, sumber daya alam menjadi terbengkalai, tidak berkembang, bahkan disalahgunakan. Sebaliknya, kekurangan sumber daya alam juga dapat menciptakan kemiskinan karena sumber daya alam merupakan kebutuhan utama manusia. Oleh karena itu, kemiskinan sumber daya alam dapat menjadi penyebab dan hasil dari kondisi kemiskinan manusia.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, teori lingkaran setan kemiskinan menyatakan bahwa kemiskinan

---

<sup>4</sup> Prayetno, "Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)", *Media Komunikasi FIS* 12, no 1 (2018): 30–45.

<sup>5</sup> Prayetno, "Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)", *Media Komunikasi FIS* 12, no 1 (2018): 30–45.

<sup>6</sup> Pratiwi dan Ghea, "Upaya Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan Ekonomi Di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial", *Jurnal Pekerjaan Sosial* 5, no 1 (2019): 72–82.

dapat menjadi suatu siklus yang sulit diputus, di mana faktor-faktor seperti pendapatan rendah, pendidikan yang terbatas, dan pengangguran saling memperkuat satu sama lain.

### c. Indikator Kemiskinan

Terdapat tiga indikator untuk mengukur kemiskinan<sup>7</sup>:

1. Angka Kejadian Kemiskinan (*The Incidence of Poverty*) mengacu pada persentase populasi yang tinggal dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah ambang batas kemiskinan. Sebagai contoh, Sayogyo menggunakan tingkat konsumsi beras sebagai penanda kemiskinan, dengan mengklasifikasikan penduduk di wilayah pedesaan sebagai miskin jika mereka mengonsumsi kurang dari 240 kg beras per kapita per tahun, sementara di wilayah perkotaan adalah 360 kg per kapita per tahun.
2. Kedalaman Kemiskinan (*The Depth of Poverty*) menggambarkan seberapa dalamnya kemiskinan di suatu daerah yang diukur dengan Indeks Jarak Kemiskinan (IJK), atau yang dikenal *sebagai Proverty Gap Index*. Indeks ini menilai perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dan garis kemiskinan sebagai persentase dari garis tersebut.
3. Tingkat Keparahan Kemiskinan (*The Severity of Poverty*) diukur melalui Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK). Prinsip dasar IKK mirip dengan IJK, namun selain mengukur jarak antara penduduk miskin dan garis kemiskinan, IKK juga menilai ketimpangan di antara penduduk miskin atau distribusi pengeluaran di kalangan mereka. Indeks ini, juga dikenal sebagai *Distributionally Sensitive Index*, dapat digunakan untuk menilai intensitas kemiskinan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dhanie Nugroho, Priadi Asmanto, dan Ardi Adji, "Leading Indicators Kemiskinan Di Indonesia: Penerapan Pada Outlook Jangka Pendek", *The Nasional Team For The Acceleration Of Poverty Reduction (TNP2K)* 92, no 11 (2020): 1–36.

<sup>8</sup> Dhanie Nugroho, Priadi Asmanto, dan Ardi Adji, "Leading Indicators Kemiskinan Di Indonesia: Penerapan Pada Outlook Jangka Pendek", *The Nasional Team For The Acceleration Of Poverty Reduction (TNP2K)* 92, no 11 (2020): 1–36.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan disuatu wilayah, dapat digunakan rumus berikut<sup>9</sup>:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

$P$  = Poverty gap index

$\alpha = 0$

$z$  = Garis Kemiskinan

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita

(sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i (indeks) = 1, 2, ..., q)),  $y_i < z$

$q$  = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n$  = jumlah penduduk

#### d. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan tidak dapat disimpulkan sebagai akibat dari satu faktor tunggal, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bekerja bersama-sama. Terdapat empat faktor yang dapat menjadi penyebab kemiskinan:<sup>10</sup>

##### 1.) Faktor Individu

Sehubungan dengan aspek patologis, mencakup kondisi fisik dan psikologis individu yang tergolong dalam komunitas miskin. Terjadinya kemiskinan dalam konteks ini disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kapabilitas individu di dalam masyarakat kurang mampu saat menghadapi realitas hidup mereka.

##### 2.) Faktor Sosial

Faktor ini mencakup kondisi lingkungan sosial yang dapat mempersempit seseorang dalam kemiskinan, seperti diskriminasi atas usia, jenis kelamin, atau etnis, yang bisa mengakibatkan seseorang terjerat dalam kemiskinan. Faktor ini juga melibatkan kondisi sosial

<sup>9</sup> Abdul Ghafur Anshori, "Hukum Dan Pemberdayaan Zakat", *Pilar Media* 13, no 47 (2019): 28.

<sup>10</sup> Priyono dan Teddy Candra, "Esensi Ekonomi Makro", *Journal of Chemical Information and Modeling*, (2018): 24.

dan ekonomi dalam keluarga di masyarakat kurang mampu yang seringkali mengakibatkan kemiskinan terwariskan antar-generasi.<sup>11</sup>

### 3.) Faktor Kultural

Berkaitan dengan aspek budaya yang dapat mengakibatkan kemiskinan, sering kali dikaitkan dengan konsep "kemiskinan kultural" atau "budaya kemiskinan". Ini melibatkan perilaku dan mentalitas negatif seperti malas, fatalisme, rasa menyerah pada nasib, kurang semangat berwirausaha, dan kurang etos kerja.

### 4.) Faktor Struktural

Mengacu pada struktur atau sistem yang dianggap tidak adil, tidak peka, dan tidak mudah diakses, sehingga dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang jatuh dalam kemiskinan. Sebagai contoh, sistem ekonomi *neoliberalisme* yang diterapkan di Indonesia telah membuat petani, nelayan, dan pekerja sektor informal tertangkap dalam kemiskinan, sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Sistem ini memberikan keuntungan lebih besar kepada orang kaya dan investor asing, yang terus mengakumulasi kekayaan.<sup>12</sup>

## e. Jenis-Jenis Kemiskinan

- 1.) Kemiskinan absolute, didefinisikan dengan menetapkan ukuran konkret yang berfokus pada kebutuhan dasar minimum yang berbeda-beda bagi anggota masyarakat. Garis batas kemiskinan ini diukur sebagai kondisi di mana pendapatan individu atau kelompok berada di bawah standar kemiskinan, yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan. Beberapa versi bahkan mencoba mencakup aspek budaya seperti pendidikan, keamanan, dan rekreasi. Konsep dan ukuran kemiskinan ini bervariasi di setiap wilayah, mengingat kebutuhan masyarakat di pedesaan dapat berbeda dengan kebutuhan di perkotaan.

---

<sup>11</sup> Rauf A. Hatu dkk, "Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo", *Jurnal Pembangunan Nasional* 3, no 2 (2017): 76–88.

<sup>12</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia Dalam Edisi Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan* (Bandung: Alfabeta, 2017): 231.

- 2.) Kemiskinan relatif, dirumuskan dengan mempertimbangkan dimensi tempat dan waktu. Asumsinya adalah bahwa tingkat kemiskinan di suatu daerah mungkin berbeda dari daerah lainnya. Kemiskinan relatif diukur berdasarkan perbandingan antara pendapatan individu dengan tingkat kekayaan masyarakat sekitarnya. Ini mencakup kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan, tetapi masih di bawah kemampuan masyarakat di sekitarnya. Orang atau kelompok dalam situasi ini disebut sebagai hampir miskin, terutama jika sebelumnya mereka memiliki kekayaan yang mencukupi tetapi mengalami penurunan ekonomi. Konsep ini sering kali mendapat kritik karena sulit menentukan apa yang dianggap sebagai kehidupan yang layak, dengan ukuran kelayakan yang bervariasi dan berubah seiring waktu.
- 3.) Kemiskinan subyektif, dirumuskan berdasarkan persepsi dan pandangan kelompok kemiskinan. Konsep ini tidak bergantung pada definisi atau pengukuran eksternal. Kelompok masyarakat yang dianggap miskin menurut standar tertentu mungkin tidak menganggap diri mereka sebagai miskin. Oleh karena itu, konsep kemiskinan subjektif lebih relevan ketika digunakan untuk memahami kemiskinan dan merancang strategi efektif untuk mengatasi masalah ini.<sup>13</sup>

#### **f. Kebijakan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan**

Kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan melibatkan serangkaian langkah-langkah jangka pendek yang diutamakan. Beberapa dari langkah-langkah tersebut melibatkan:

- 1) Mengurangi kesenjangan daerah:
  - a) Menyediakan fasilitas irigasi, pasokan air bersih, dan sanitasi dasar, terutama di daerah yang mengalami keterbatasan pasokan air.
  - b) Melakukan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan dermaga di daerah tertinggal.

---

<sup>13</sup> Sa'diyah Adawiyah, Kemiskinan Dan Fktor-Faktor Penyebabnya", *Journal of Social Work and Social Service* 1, no 1 (2020): 24-33.

- c) Meratakan alokasi dana ke daerah dengan pendapatan rendah melalui instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 2) Memperluas peluang kerja dan usaha dengan cara seperti memberikan bantuan dana stimulus untuk modal usaha, memberikan pelatihan keterampilan kerja, meningkatkan investasi, dan merevitalisasi sektor industri.
- 3) Untuk memastikan pemenuhan hak dasar penduduk miskin, pemerintah memberikan layanan seperti:
  - a) Memberikan pendidikan gratis sebagai bagian dari program belajar 9 tahun, termasuk tunjangan bagi siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi.
  - b) Memberikan jaminan pelayanan kesehatan gratis kepada penduduk miskin melalui puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.<sup>14</sup>

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berupaya secara aktif untuk mengatasi kemiskinan dan memastikan pemenuhan hak dasar bagi penduduk yang berada dalam kondisi ekonomi rendah.

#### **g. Strategi dalam Mengurangi Kemiskinan**

Arsyad mengusulkan beberapa strategi dalam mengurangi kemiskinan, antara lain:<sup>15</sup>

- a. Pembangunan Pertanian
 

Peran utama sektor pertanian dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia ditekankan. Kemajuan teknologi dalam pertanian, termasuk pembangunan sistem irigasi, telah secara signifikan berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan.
- b. Pembangunan Sumber Daya Manusia
 

Strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia mencakup peningkatan akses ke layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Investasi modal dalam

---

<sup>14</sup> Josef Papilaya, "Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan)", *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan* 4, no 1 (2020): 67-74.

<sup>15</sup> Sholeh, dkk, "Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan Terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin Di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmur Kabupaten Aceh Timur", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no 2 (2017): 149–159.

perluasan cakupan dan peningkatan kualitas layanan dasar ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kelompok miskin. Layanan-layanan ini juga dianggap mampu memenuhi kebutuhan dasar kelompok miskin, seperti pasokan air bersih, pengelolaan sampah, perumahan, dan sebagainya.

c. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pentingnya peran LSM dalam merancang dan melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan ditekankan. Keterlibatan LSM dianggap dapat mengurangi beban finansial dan personel dalam pelaksanaan program padat karya untuk mengatasi kemiskinan.<sup>16</sup>

#### **h. Kemiskinan Menurut Pandangan Islam**

Kemiskinan dalam perspektif Islam dianggap sebagai hasil dari upaya revolusi sosial masa lalu untuk mengatasi ketidaksetaraan antara golongan kaya dan miskin. Dalam Al-Qur'an, kemiskinan dijelaskan sebagai sebuah bencana yang dapat mengancam akhlak, kebijaksanaan, stabilitas keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Islam memandang kemiskinan sebagai musibah yang harus dihindari, dan memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang terkandung di dalamnya.

Dalam Al-Qur'an, orang miskin diakui sebagai penerima zakat, dan istilah "fakir" dan "miskin" digunakan dengan berbagai makna. Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan untuk mengatasi kemiskinan

Kemiskinan juga dianggap dapat mengancam keyakinan agama seseorang dan menyebabkan penyimpangan dalam kepercayaan. Selain itu, kemiskinan dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan menjadi suatu keharusan dalam program

---

<sup>16</sup> Taufik Nurohman, "Peran LSM Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Peran LSM Kompleet Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Melung Kabupaten Banyumas)", *Jurnal Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya* 3, no 1 (2018): 81–103.

pemerintah untuk menciptakan kondisi hidup yang lebih baik bagi warga masyarakat yang menghadapi kemiskinan.<sup>17</sup>

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan dibagi menjadi dua kategori, yaitu fakir dan miskin. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i dan Hambali, fakir adalah seseorang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan karena alasan tertentu, seperti usia tua atau keterlibatan dalam dakwah yang menghambat mereka untuk mencari nafkah. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip zakat dalam Islam yang menekankan pentingnya membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Sistem ekonomi Islam dinilai bersahabat dengan situasi ini karena mengutamakan kesejahteraan sesama manusia.<sup>18</sup>

Pada kenyataannya, Allah tidak akan merubah nasib seseorang tanpa usaha atau ikhtiar untuk mengubah dirinya sendiri. Ketidakmampuan untuk berusaha disebabkan oleh faktor eksternal disebut sebagai kemiskinan struktural. Lebih jelasnya, jaminan rizki yang dijanjikan Allah SWT ditunjukkan untuk makhluk yang dinamakan *dabbah*, yang berarti bergerak. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat Hud (11:6):

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: “Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfudz).” (QS. Hud, 11:6).

<sup>19</sup>

Surat tersebut menggambarkan bahwa semua makhluk hidup di bumi, tanpa terkecuali, bergantung pada Allah SWT sebagai sumber utama rezeki mereka. Allah adalah pencipta

<sup>17</sup> Firdaningsih, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks", *Journal Ekonomi Syariah* 7, no 2 (2019): 316–342.

<sup>18</sup> Afandi, Johan, "Microstock Platform Analysis: Opportunities to Enhance the Creative Economy From an Islamic Economics Perspective", *An-Nisbah: Ekonomi Syariah* 10, no 1 (2023): 109.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat Hud Dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2019), 226.

dan pengatur segala sesuatu, mengetahui secara pasti di mana setiap makhluk berada dan di mana rizki mereka tersimpan. Segala peristiwa, termasuk pemberian rezeki, telah dicatat dan tercatat dalam kitab ilahi yang disebut Lauhul Mahfuzh, yang memuat semua kejadian yang akan terjadi. Allah memberikan rezeki kepada mereka yang berusaha dan bergerak untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, walaupun Allah adalah pemilik sejati segala rezeki, manusia diwajibkan untuk berusaha dan bekerja keras guna memperoleh rizki dengan menjalani kehidupan yang baik, berupaya, dan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, Allah akan menepati janji-Nya untuk memberikan rizki kepada mereka yang berusaha dan bergerak untuk meningkatkan diri serta mencari rezeki dengan cara yang halal.<sup>20</sup>

Pesan tersebut mengajarkan nilai pentingnya usaha manusia (iktikad) dalam mencapai rezeki, dan bahwa kendala yang diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti kemiskinan struktural, merupakan masalah yang perlu diatasi melalui upaya bersama masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan ekonomi.

#### **i. Hubungan Antara PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan**

Pembangunan ekonomi suatu negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang tinggi dalam suatu negara dapat menjadi kendala serius terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi tersebut. Pengangguran memberikan dampak negatif pada seluruh aktivitas ekonomi dan juga berpotensi mengganggu stabilitas politik. Dampak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat karena pengangguran dapat menghambat mereka dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang seharusnya dapat dicapai. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pengangguran dapat menyebabkan pendapatan nasional riil yang diterima oleh masyarakat lebih rendah daripada pendapatan yang seharusnya mereka

---

<sup>20</sup> Anshor, *Journey to Success* (Solo: Tinta Media, 2017), 55.

peroleh, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi terbatas.<sup>21</sup>

Pengangguran juga memberikan dampak tidak langsung pada pendapatan nasional, karena tingginya jumlah pengangguran dapat menyebabkan penurunan PDRB, yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan nasional. Penurunan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita disebabkan oleh ketidakaktifan salah satu faktor produksi utama, yaitu tenaga kerja, sehingga menghasilkan produksi yang rendah. Ketika pendapatan rendah, hal ini juga akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dan kemampuan mereka untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Investasi dalam bidang pendidikan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan yang lebih baik, seseorang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, semakin produktif mereka dalam berbagai aspek pekerjaan.

Kondisi kemiskinan dapat berasal dari setidaknya tiga penyebab, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang rendah. Keberhasilan pembangunan dan upaya mengurangi tingkat kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan PDRB sebagai indikator. Ketidakmampuan suatu wilayah untuk menghasilkan pendapatan yang memadai dapat berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan di masyarakat. Penyebab kedua adalah rendahnya tingkat pendidikan, yang menjadi faktor penting yang menyebabkan kemiskinan. Keterbatasan akses dan partisipasi dalam dunia pendidikan dapat mengakibatkan kurangnya keterampilan dan peluang pekerjaan, membatasi kemampuan individu untuk mencapai pendapatan yang memadai. Yang ketiga adalah pengangguran, yang merupakan penyebab kemiskinan yang signifikan. Tingginya tingkat pengangguran dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat, karena individu yang tidak bekerja menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perumahan, dan pendidikan.

Ketiga faktor tersebut saling terkait dan saling memperkuat, menciptakan lingkungan di mana kemiskinan

---

<sup>21</sup> Bappeda, "Pembangunan Ekonomi Dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan", *Ekonomi Pembangunan* 2, no 4 (2017): 44–45.

dapat berlanjut dan memengaruhi kehidupan banyak individu dalam suatu wilayah.<sup>22</sup>

## 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

### a. Pengertian PDRB

PDRB adalah nilai hasil produksi barang dan jasa dalam suatu daerah selama periode tertentu, umumnya satu tahun, dengan menggunakan harga konstan sebagai acuan.<sup>23</sup> Tingkat PDRB suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti potensi sumber daya alam, kualitas tenaga kerja, teknologi pengolahan sumber daya alam, dan kebijakan pembangunan.<sup>24</sup> Potensi yang besar dalam sumber daya alam, tenaga kerja berkualitas, teknologi efisien, dan kebijakan pembangunan yang tepat dapat meningkatkan PDRB.<sup>25</sup> Pertumbuhan ekonomi diukur melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam PDRB per kapita, yaitu PDRB total dibagi oleh jumlah penduduk.<sup>26</sup>

Cara menghitung pendapatan per kapita melibatkan penjumlahan pendapatan seluruh penduduk suatu negara pada tahun tertentu, lalu dibagi dengan jumlah penduduk pada periode yang sama. Rumusnya dapat dirinci sebagai berikut.<sup>27</sup>

$$\text{GDP (Gross Domestic Bruto) Per kapita} = \frac{\text{PDB (Produk Domestik Bruto)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

<sup>22</sup> Angga Maulana, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto Suharto, "Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no 1 (2022): 220–29, <<https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.142>>.

<sup>23</sup> "Badan Pusat Statistik", (2023), <<https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>>.

<sup>24</sup> Badan Perencanaan dan Litbang, *Penyusunan Analisa Produk Domestik Bruto* (Jakarta: Gramedia, 2018), 105.

<sup>25</sup> Aram Palilu, *Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto* (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), 77-111.

<sup>26</sup> Putri. Romhadhoni, dkk, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Matematika Integratif* 14, no 2 (2019): 2-4.

<sup>27</sup> Priyono dan Candra, *Esensi Ekonomi Makro* (Surabaya: Zifatama: 2018), 35.

## b. Teori Terkait PDRB

### 1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik muncul pada periode revolusi industri di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, yang ditandai oleh perkembangan ekonomi yang pesat. Aliran klasik ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo.

#### a) Adam Smith

Adam Smith adalah tokoh pertama yang secara terstruktur membahas pertumbuhan ekonomi. Dalam karyanya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, Smith menjelaskan proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Bagi Smith, pertumbuhan ekonomi memiliki dua aspek utama: peningkatan total produksi dan pertumbuhan penduduk. Smith mengidentifikasi tiga elemen kunci dalam sistem produksi suatu negara, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan stok modal barang. Menurut Smith, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, diperlukan spesialisasi atau pembagian kerja yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi alat atau mesin, serta mempercepat peningkatan produksi.<sup>28</sup>

#### b) David Ricardo

David Ricardo pertama kali menyajikan teorinya dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation*. Secara umum, teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Ricardo memiliki persamaan dengan teori Adam Smith, yaitu dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan produksi. Dalam konteks faktor produksi seperti tanah dan tenaga kerja, terdapat dinamika kuat yang cenderung mendorong ekonomi ke arah tingkat upah minimum, yang dikenal sebagai hukum pengurangan hasil (*the law of diminishing return*). Akumulasi modal dan kemajuan teknologi

---

<sup>28</sup> Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi* (Bandung: PT. Media Sains, 2018), 56-75.

memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat memperlambat efek hukum pengurangan hasil yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat hidup masyarakat menuju tingkat minimum.

## 2. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Dalam model pertumbuhan ekonomi neoklasik Solow, perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti pertumbuhan populasi, tenaga kerja, akumulasi modal, dan inovasi teknologi. Solow menekankan pentingnya kemajuan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penelitiannya. Model Harrod-Domar, serupa dengan model Solow-Swan, juga menyoroti interaksi antara pertumbuhan populasi, akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan produksi sebagai elemen kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi. Teori ini melengkapi analisis Keynes mengenai penentuan tingkat aktivitas ekonomi. Harrod-Domar menegaskan bahwa investasi memegang peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi, karena investasi memengaruhi permintaan agregat dengan menciptakan pendapatan dan penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi.<sup>29</sup> Model pertumbuhan neoklasik Solow menggunakan fungsi produk agregat:<sup>30</sup>

$$Y = A \cdot F(K, L)$$

Keterangan:

Y = *Income* (Berupa PDRB)

A = Total Produktivitas (Teknologi)

K = Tingkat Modal (Kapital)

L = Tingkat Tenaga Kerja

F = Fungsi Produksi

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat timbul dari peningkatan input dan kemajuan teknologi, yang juga dikenal sebagai pertumbuhan

---

<sup>29</sup> Inma Fatmawati dan Wildan Syafitri, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Model Solow Dan Model Schumpeter", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, (2019): 1–12, <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1860/1702>>.

<sup>30</sup> Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi*, (Surabaya: Dharma Ilmu, 2016), 31.

produktivitas total. Menurut model pertumbuhan ini, peningkatan produksi selalu berasal dari tiga elemen: peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja, penambahan modal, dan kemajuan teknologi.

### 3. Teori Pertumbuhan Kuznet

Simon Kuznet melakukan perhitungan dan analisis sejarah pertumbuhan ekonomi dalam negara-negara maju dalam jangka panjang. Pertumbuhan dalam produksi kapitalis berakar pada perkembangan teknologi, pembangunan institusi, sikap, dan ideologi. Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai peningkatan kemampuan negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Peningkatan kemampuan ini terjadi melalui kemajuan teknologi, pembangunan institusi, dan penyesuaian ideologi yang diperlukan.<sup>31</sup>

## c. Perhitungan PDRB

Untuk menghitung PDRB, terdapat tiga pendekatan yang digunakan:

### 1.) Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi PDRB melibatkan penjumlahan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di suatu wilayah selama periode tertentu, misalnya satu tahun. Dalam analisis unit-unit ekonomi dikelompokkan menjadi 17 sektor usaha, sesuai dengan standar SNA 2008. Sektor-sektor ini meliputi pertanian; pertambangan dan ekstraksi mineral; industri pengolahan; energi dan gas; penyediaan air, pengelolaan limbah dan sampah; konstruksi; perdagangan dan perbaikan kendaraan bermotor; transportasi dan pergudangan; telekomunikasi dan transportasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; *real estat*; layanan perusahaan; administrasi pemerintah; pertahanan dan jaminan sosial wajib; layanan pendidikan; layanan kesehatan dan kegiatan sosial; serta

---

<sup>31</sup> Endang dan Mustofa Mulyani, "Ekonomi Pembangunan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi* 6, no 3 (2019): 1–17.

layanan lainnya.<sup>32</sup> Berikut merupakan langkah-langkah perumusannya:<sup>33</sup>

$$Y = NTB1 + NTB2 + \dots$$

Keterangan:

Y = Pendapatan

NTB = Nilai tambah dari setiap sektor ekonomi

2.) Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan PDRB melibatkan perhitungan total kompensasi yang diterima oleh faktor-faktor produksi, seperti upah, keuntungan, dividen, dan pendapatan sewa. Faktor-faktor pendapatan ini mencakup upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan faktor keuntungan, semua sebelum potongan pajak Penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB juga mencakup depresiasi barang modal tetap dan pajak tidak langsung bersih (yaitu pajak tidak langsung dikurangi subsidi). Jumlah seluruh komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Karena jumlah pekerja dan pelaku usaha di sektor informal di Indonesia cukup besar, dan tingkat kepatuhan pajak rendah dikalangan sebagaimana pekerja dan pelaku usaha sektor informal, maka perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan menjadi sulit dilakukan untuk mendapatkan angka yang akurat.<sup>34</sup> Berikut merupakan langkah-langkah perumusannya:<sup>35</sup>

$$Y = r + w + i + p$$

<sup>32</sup> BPS, 'Analisis Produk Domesti Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan 2012-2016', *Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta*, (2018): 1-3.

<sup>33</sup> Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi*, (Surabaya: Dharma Ilmu, 2016), 40.

<sup>34</sup> BPS, "Analisis Produk Domesti Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan 2012-2016", *Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta*, (2018): 4-5 .

<sup>35</sup> Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi*, (Surabaya: Dharma Ilmu, 2016), 41.

Keterangan:

Y = Pendapatan

r = Sewa

w = Upah

i = Investasi

p = Profit

### 3.) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran PDRB melibatkan penjumlahan komponen permintaan akhir dari rumah tangga, pemerintah, dan pelaku usaha. Dalam konteks ekonomi terbuka, perhitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran harus memperhitungkan ekspor neto, yaitu perbedaan antara ekspor dan impor. BPS secara berkala menerbitkan data PDR dan PDRB. Pentingnya menggunakan metode konsisten dalam menghitung PDR dan PDRB dari waktu ke waktu, sehingga memungkinkan perbandingan berkelanjutan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi.<sup>36</sup> Komponen permintaan akhir mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor bersih. Berikut merupakan langkah-langkah perumusannya:<sup>37</sup>

$$Y = C + G + I(X-M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan

C = Konsumsi rumah tangga

I = Investasi

G = Pengeluaran pemerintah

X = Ekspor

M = Impor

<sup>36</sup> Silviana, Wijayanti, *Buku Ajar Teori Makro* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 78-80.

<sup>37</sup> Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi*, (Surabaya: Dharma Ilmu, 2016), 42.

#### d. Turunan PDRB

1. PDRB atas dasar Harga Pasar  
PDRB yang dihitung berdasarkan harga pasar adalah jumlah keseluruhan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi dalam suatu wilayah, termasuk depresiasi dan pajak tidak langsung bersih.<sup>38</sup>
2. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas dasar harga pasar  
PDRN yang dihitung berdasarkan harga pasar merupakan PDB berdasarkan harga pasar yang telah dikurangi depresiasi. Depresiasi mengacu pada penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi selama satu tahun.<sup>39</sup>
3. PDRN atas dasar biaya faktor  
PDRN yang dihitung berdasarkan biaya faktor adalah PDRN yang telah dikurangi dengan pajak tidak langsung bersih. Pajak tidak langsung bersih mencakup pajak tidak langsung yang dikumpulkan oleh pemerintah dikurangi subsidi pemerintah, keduanya dikenakan pada barang dan jasa yang diproduksi atau dijual.
4. PDRB per Kapita  
PDRB per kapita adalah hasil bagi PDRB oleh jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Terdapat dua ukuran PDRB per kapita, yakni PDB per kapita berdasarkan harga berlaku (nominal) dan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan (riil). Data penduduk yang digunakan biasanya adalah hasil proyeksi penduduk di Kabupaten/Kota berdasarkan sensus penduduk 2010. Data PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi jika dibagi secara merata kepada semua penduduk wilayah tersebut.
5. Indeks Perkembangan Kategori  
Indeks pertumbuhan mencerminkan perkembangan nilai tambah dalam tahun tertentu dibandingkan dengan tahun dasar. Indeks pertumbuhan sektoral dapat berfungsi

---

<sup>38</sup> Sufi Khairun Hasibuan, "Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara Tahun 2000-2016", *Skripsi*, (2018): 1-110.

<sup>39</sup> Edi, *Ekonomi di Indonesia Dalam Edisi Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan* (Bandung: Alfabeta, 2018), 136.

sebagai indikator untuk menilai sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cepat, lambat, atau penurunan sejak tahun dasar (2010).<sup>40</sup> Dengan memperhatikan nilai indeks ini, kita dapat mengetahui sektor mana yang memiliki prospek yang baik di masa depan.

**e. PDRB Menurut Pandangan Islam**

PDRB dalam perspektif Islam mencerminkan ukuran ekonomi yang memperhitungkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam periode tertentu, dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Konsep PDRB dalam Islam menekankan pentingnya keadilan ekonomi, distribusi yang adil, dan upaya mencapai kesejahteraan sosial.<sup>41</sup>

Salah satu ayat Al-Qur'an yang mencerminkan pentingnya keadilan ekonomi dalam Islam adalah Surat Al-Hasyr (59:7) yang menyatakan:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنِ الْأَغْيَاءِ  
 مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya kepada penduduk negeri-negeri (ia adalah) untuk Allah dan Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya jangan beredar ke (tangan-tangan) orang-orang yang kuasa di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul itu kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu,

<sup>40</sup> Hajeri, Erlinda Yurusintha, dan Eva Dolorosa, "Sektor Unggulan Di Kubu Raya", *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 4, no 2 (2019): 253–69.

<sup>41</sup> Bappeda DIY, "Analisis PDRB DIY 2015-2019", (2020): 1–213.

maka tinggalkanlah kamu” (QS. Al-Hasyr, 59:7).

<sup>42</sup>

Ayat ini menggaris bawahi pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks PDRB, hal ini mengingatkan kita akan pentingnya memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan oleh suatu negara harus didistribusikan dengan adil kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang membutuhkan.<sup>43</sup> Selain itu konsep kesejahteraan sosial dalam Islam ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur’an, seperti Surat Al-Baqarah (2:267):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن  
تَغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ

Artinya: “Orang-orang yang memberikan harta mereka di malam dan siang hari, diam tersembunyi dan terang-terangan, mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. Al-Baqarah, 2:267).<sup>44</sup>

Ayat ini mengingatkan kita bahwa pemahaman tentang kesejahteraan sosial dalam Islam mencakup peran filantropi, zakat, dan infak yang mendorong kontribusi positif masyarakat terhadap kesejahteraan bersama.

Pada kesimpulannya, konsep PDRB dalam Islam menekankan keadilan ekonomi, distribusi yang adil, dan upaya mencapai kesejahteraan sosial yang sesuai dengan ajaran syariah. Ayat-ayat Al-Qur’an yang disebutkan di atas menguatkan prinsip-prinsip ini dan mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita dalam menciptakan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan dalam perspektif Islam.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Surat Al-Hasyr Dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2019), 118.

<sup>43</sup> Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi* (Bandung: Dharma Ilmu, 2017), 211.

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2019), 73.

Dalam konteks Islam, standar untuk mengukur kemiskinan berfokus pada nilai harta, yang dinyatakan dalam nisab yang menjadi acuan dalam zakat. Dalam zakat ada ketentuan bahwa suatu pendapatan atau kekayaan harus dikenakan zakat jika nilainya mencapai nisab dalam satu tahun.

#### **f. Hubungan PDRB Terhadap Kemiskinan**

Pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan merupakan aspek krusial dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan menjadi elemen penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Namun, perlu dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa penciptaan lapangan kerja dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan.<sup>45</sup>

Pendekatan konvensional terhadap pembangunan seringkali hanya menitikberatkan pada peningkatan PDRB di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Namun, lebih penting untuk mengkaji sejauh mana pendapatan telah tersebar di antara lapisan masyarakat dan siapa yang sebenarnya mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Pengurangan PDRB suatu wilayah dapat berdampak negatif pada kualitas hidup dan konsumsi rumah tangga, terutama ketika pendapatan penduduk terbatas, memaksa rumah tangga miskin untuk mengubah pola makan mereka dengan beralih ke barang-barang yang lebih murah meskipun jumlahnya berkurang.<sup>46</sup>

PDRB merupakan indikator kunci untuk menilai pencapaian pembangunan suatu negara. Peningkatan PDRB setiap tahun mencerminkan perkembangan positif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Peningkatan PDRB juga mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan

---

<sup>45</sup> Fatkhul Muflid Cholili, "Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin", *Journal of Economic and Business*, (2019): 1–14.

<sup>46</sup> Yozi Aulia Rahman and Ayunda Lintang Chamelia, 'Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pdrb Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2018', *Jejak* 8, no 1 (2018): 88–99, <<https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3857>>.

kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut pandangan Kunzet, terdapat hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pada tahap awal proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, tetapi menjelang tahap akhir pembangunan, jumlah orang miskin cenderung berkurang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar menunjukkan hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB, dan penurunan jumlah penduduk miskin. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB cenderung berdampak negatif pada tingkat kemiskinan.<sup>47</sup>

### 3. Pendidikan

#### a. Pengertian Pendidikan

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang diselenggarakan secara sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran. Tujuannya adalah memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi diri mereka, memiliki kualitas spiritual dan keagamaan, mengendalikan diri, membangun kepribadian, mengasah kecerdasan, membentuk akhlak yang mulia, dan mengembangkan keterampilan berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>48</sup>

Pendidikan memiliki peran kunci dalam melawan kemiskinan pengetahuan, mengatasi kebodohan, dan menangani berbagai masalah bangsa. Tujuan utamanya adalah menciptakan individu yang lebih lengkap dengan menggunakan pendidikan sebagai alat untuk menyadarkan individu tentang realitas kehidupan sehari-hari.<sup>49</sup>

Melalui proses pengajaran dan pelatihan, pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dan keahlian yang mereka butuhkan dalam dunia kerja. Dengan kata lain, pendidikan berperan dalam mempersiapkan individu sebagai tenaga

---

<sup>47</sup> Andian, "Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur 2009-2019", *Jurnal Imiah* 2, no 2 (2019): 17-20.

<sup>48</sup> 'UU 20 Tahun 2003, Tentang Sitem Pendidikan Nasional'.

<sup>49</sup> Mardinal, "Filsaat Pendidikan Ki Hajar Dewantara Dan Perkembangan Pendidikan Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 3, no 1 (2022): 23-25.

kerja yang siap untuk menghadapi tantangan dunia kerja melalui proses pembelajaran dan pelatihan yang bertujuan untuk mempertajam kemampuan mereka dalam suatu pekerjaan.<sup>50</sup>

Pendidikan juga memiliki peran tak terbantahkan dalam meningkatkan tingkat melek huruf di masyarakat. Sistem pendidikan yang efektif memberikan akses kepada individu untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menulis, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat melek huruf. Proses pendidikan inklusif dan berkualitas memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar.

Dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan. Dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan, masyarakat dapat mencapai tingkat melek huruf yang lebih tinggi, menciptakan fondasi yang kuat untuk kemajuan pribadi dan perkembangan komunitas secara keseluruhan.<sup>51</sup> Oleh karena itu, upaya berkelanjutan untuk memperluas dan meningkatkan kualitas pendidikan sangat diperlukan guna mendukung peningkatan angka melek huruf sebagai landasan utama menuju pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mengukur tingkat angka melek huruf di suatu wilayah, dapat digunakan rumus sebagai berikut:<sup>52</sup>

$$AMH_{15+}^t = \frac{MH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100\%$$

Keterangan:

$AMH_{15+}^t$  = Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun t

$MH_{15+}^t$  = Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca

<sup>50</sup> U.H. Saidah, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 76.

<sup>51</sup> Musyarifah, "Mobilitas Sosial Dalam Pendidikan", *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2019): 34-35.

<sup>52</sup> Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi* (Bandung: Dharma Ilmu, 2017), 135.

$$P_{15+}^t = \text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dan menulis pada tahun } t$$

### b. Dasar Hukum dan Teori Tentang Pendidikan

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas:

- 1.) Pendidikan Formal  
Pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang memiliki struktur berjenjang, terorganisasi, dan meliputi tahap-tahap pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- 2.) Pendidikan Nonformal  
Pendidikan nonformal merujuk pada jalur pendidikan yang berada di luar sistem formal, tidak memiliki struktur berjenjang, dan biasanya terdiri dari program-program seperti kursus.
- 3.) Pendidikan Informal  
Pendidikan informal mengacu pada pendidikan yang terjadi dalam konteks keluarga dan lingkungan sehari-hari. Fungsinya mencakup penanaman nilai-nilai agama, budaya, moral, serta penguasaan keterampilan praktis seperti organisasi.<sup>53</sup>

Pada teori *Human Capital* menekankan bahwasannya peran pendidikan dapat membantu dalam meningkatkan penghasilan. Teori ini dikemukakan oleh ekonom Skotlandia abad ke 18, Adam Smith. Namun, ekonom Amerika, Greg Becker, bisa dibulan merupakan pionir terbesar teori sumber daya manusia. Setiap penambahan satu tahun sekolah berarti di suatu pihak terdapat peningkatan kemampuan kerja dan penghasilan seseorang. Proses dalam peningkatan pengetahuan maupun keterampilan seseorang melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi sementara, namun merupakan suatu investasi. Investasi pada tahun tertentu akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia berkualitas pada tahun berikutnya, dan memerlukan waktu yang lama. Angkatan kerja yang terdidik akan lebih mampu berkualifikasi dalam lapangan pekerjaan yang ditentukan. Maka dari itu, pekerja yang berpendidikan tinggi akan mampu merespon inovasi yang selanjutnya dapat

---

<sup>53</sup> Umar Tirtaraharja, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018), 134.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat mengurangi kemiskinan.<sup>54</sup>

### c. Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dapat diatributkan kepada tiga faktor utama, yaitu sebagai berikut:

#### 1.) Pendekatan Pembelajaran

Masalah pendidikan yang muncul di masyarakat Indonesia seringkali berakar dari kegagalan sistem pembelajaran, termasuk kendala dalam aspek pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ketidakefektifan dalam aspek-aspek tersebut dapat berdampak negatif pada anak-anak, menyebabkan mereka mengalami kesulitan atau mengembangkan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.

#### 2.) Perubahan Kurikulum

Di Indonesia, setiap kali terjadi pergantian pemerintahan atau kabinet, terutama di tingkat Menteri Pendidikan, kurikulum pendidikan sering mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini dapat memiliki dampak merugikan pada kualitas pendidikan. Kontinuitas perubahan kurikulum tanpa dasar yang konsisten dapat menyulitkan guru dalam perencanaan pengajaran, sehingga kualitas pendidikan tidak mencapai potensinya.

#### 3.) Kompetensi Guru

Pendidikan yang berkualitas memerlukan guru-guru yang memiliki kompetensi tinggi, yang mampu memahami materi pembelajaran secara mendalam dan menyeluruh. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan mendapatkan guru dengan kompetensi sesuai kebutuhan, terutama di daerah-daerah terpencil.<sup>55</sup>

### d. Solusi Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Hingga saat ini, mutu pendidikan di Indonesia masih dianggap rendah bila dibandingkan dengan standar

---

<sup>54</sup> Sopan Adrianto dan Helena Ras Ulina Sembiring, *Memposisikan Human Capital Menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2022), 54-56.

<sup>55</sup> Nurul Faida, Siti dan Fitri, "Problematika Kualitas Pendidikan Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no 1 (2021): 14-22.

internasional. Meskipun pendidikan memiliki peran krusial dalam kemajuan negara, kualitasnya masih menjadi perhatian utama. Pendidikan dianggap sebagai kunci utama dalam membentuk masyarakat yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah dan solusi konkret untuk mencapai tujuan nasional pendidikan, yaitu menciptakan individu-individu yang memiliki kualitas yang baik. Berikut beberapa usulan untuk mengatasi tantangan tersebut:<sup>56</sup>

1. Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  
Menyusun program pendidikan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta teknologi di lingkungan sekolah.
2. Mengatasi Laju Pertumbuhan Penduduk  
Menyadari bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat berdampak pada aspek pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan. Ketidakseimbangan antara jumlah peserta didik dan kapasitas sekolah perlu diatasi untuk memastikan kualitas dan relevansi pendidikan.
3. Melakukan Pemerataan Pendidikan  
Menghadapi ketidakmerataan pendidikan dengan memberikan perhatian yang setara kepada semua daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada keluarga yang kurang mampu dapat memastikan akses pendidikan yang merata. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung upaya ini.
4. Peningkatan Kesejahteraan Guru  
Menyadari peran kunci guru dalam sistem pendidikan dan memastikan kesejahteraan mereka agar tujuan pendidikan dapat tercapai.
5. Meningkatkan Mutu Pendidikan  
Mutu pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan untuk memenuhi tujuan pendidikan yang diharapkan. Hal ini dapat dicapai melalui perbaikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai, serta penyelenggaraan program-program seperti kursus dan literasi.
6. Peningkatan Prestasi Belajar Siswa

---

<sup>56</sup> Fitria Kurniawati, "Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi", *Academy of Education Journal* 13, no 1 (2022): 56.

Mengatasi rendahnya prestasi belajar siswa dengan membuat proses pembelajaran lebih menarik dan efektif, mendorong keterlibatan aktif siswa, memberikan motivasi oleh orang tua, dan melibatkan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran yang optimal.<sup>57</sup>

#### e. Pendidikan Menurut Pandangan Islam

Dalam Islam, pendidikan diwajibkan bagi seluruh umat Muslim karena ilmu pengetahuan memungkinkan seseorang membedakan antara yang benar dan yang salah. Dengan ilmu, seseorang dapat membuat keputusan yang bijaksana dalam menghadapi berbagai tantangan.<sup>58</sup> Melalui pendidikan, individu dapat meningkatkan martabatnya dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa “tujuan dari pendidikan adalah untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu pengetahuan memungkinkan individu untuk mengabdikan diri kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan mendekati diri kepada malaikat di akhirat. Di dunia, ilmu pengetahuan dapat menghasilkan kemuliaan, pengaruh dalam kepemimpinan negara, dan penghormatan sesuai dengan norma sosial”. Dalam kutipan tersebut, Al-Ghazali mengajarkan bahwa fokus pendidikan seharusnya tidak hanya pada kehidupan dunia atau akhirat, tetapi seharusnya mencakup keduanya. Pendidikan yang diharapkan dalam masyarakat Muslim, menurut Al-Ghazali, harus mencakup pencapaian kebahagiaan di dunia dan akhirat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur’an, seperti yang dinyatakan dalam surat Al-Mujadila (58:11):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ فَاَفْسَحُوْا  
 يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا ۗ يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ  
 وَالَّذِيْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-

<sup>57</sup> Fitria Kurniawati, "Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi", *Academy of Education Journal* 13, no 1 (2022): 56.

<sup>58</sup> Anisa Nandya, "Etika Murid Terhadap Guru (Analisis Kitab Ta'lim Muta'allim Karangan Syaikh Az-Zarnuji)", *Mudarissa* 2, no 1 (2020): 163–328.

majelis,” maka lapangkanlah untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadila, 58:11).

59

Ayat tersebut mengandung prinsip penting tentang pencarian ilmu dan kewajiban untuk meningkatkan pengetahuan. Ayat tersebut mendorong untuk memberikan kelapangan dalam mencari pengetahuan dalam majelis atau pertemuan, dan Allah akan memberikan kemudahan serta keberkahan dalam upaya mencari ilmu. Ini mencerminkan pentingnya pendidikan dalam Islam dan dukungan Al-Qur'an terhadap pencarian ilmu.

Kesimpulannya, pendidikan dalam Islam dilihat sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pencarian ilmu ditekankan sebagai kewajiban, dan prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep pendidikan Al-Ghazali yang mengadvokasi keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Melalui ilmu pengetahuan, individu dapat lebih baik memahami tugas-tugas agama dan menjalani kehidupan dengan bijaksana.<sup>60</sup>

#### **f. Hubungan PDRB Terhadap Kemiskinan**

Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang melalui akuisisi pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan dapat dianggap sebagai bentuk investasi dalam sumber daya manusia. Tingkat pendidikan berpengaruh pada kaemiskinan karena pendidikan merupakan komponen utama dalam siklus kemiskinan. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji yang layak. Pendapatan yang mencukupi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui pendidikan yang tinggi.

---

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat Al-Mujadila Dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2019), 455.

<sup>60</sup> Nandya, "Etika Murid Terhadap Guru (Analisis Kitab Ta'lim Muta'allim Karangan Syaikh Az-Zarnuji)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no 1 (2020): 1-7.

Menurut pandangan tokoh Todaro, hubungan antara pendidikan, produktivitas tenaga kerja, dan tingkat *output* sangat penting dalam konteks ekonomi. Penelitian ekonomi di berbagai negara, termasuk yang maju maupun berkembang, sering kali menitikberatkan pada keterkaitan ini. Todaro menekankan bahwa pendidikan adalah tujuan dasar pembangunan karena memiliki peran kunci dalam memungkinkan negara untuk mengadopsi teknologi modern dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.<sup>61</sup>

Gaiha mengemukakan bahwa pendidikan berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan individu dengan berbagai cara. Pendidikan memperbaiki kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan menggunakan informasi, memahami ekonomi secara lebih baik, serta meningkatkan produktivitas. Terdapat keterkaitan positif antara pendidikan dan distribusi pendapatan individu selama masa hidup. Oleh karena itu, individu yang berada dalam kondisi kurang mampu yang ingin meraih pekerjaan dan pendapatan yang tinggi perlu memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Namun, sayangnya, akses terhadap pendidikan tinggi sering menjadi kendala bagi orang miskin, karena seringkali memerlukan sumber daya finansial yang cukup.

Menurut penelitian Hermanto, pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan, bahkan lebih besar dibandingkan dengan variabel lain seperti jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi. Hal ini menegaskan peran krusial pendidikan dalam mengatasi masalah kemiskinan.<sup>62</sup>

#### 4. Pengangguran

##### a. Definisi Pengangguran

Pengangguran tidak hanya terkait dengan individu yang saat ini tidak bekerja, melainkan mencakup mereka yang sedang mencari pekerjaan atau berusaha mengembangkan karier mereka namun belum berhasil menemukan pekerjaan. Pengangguran mencakup sekelompok orang yang ingin bekerja, sedang berupaya untuk memperoleh atau meningkatkan pekerjaan mereka, tetapi belum berhasil

---

96. <sup>61</sup> Umar Tirtaraharja, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018),

98. <sup>62</sup> Umar Tirtaraharja, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018),

mencapainya. Pengangguran atau individu yang menganggur adalah mereka yang pada umumnya berada dalam usia kerja, yaitu di atas usia sekolah dasar hingga menengah, namun tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran mencakup berbagai situasi, termasuk individu yang mencari aktif pekerjaan, yang sedang mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa putus asa untuk menemukannya, atau bahkan yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum bekerja. Tokoh yang merumuskan untuk menghitung tingkat pengangguran adalah Adam Smith, yang dikenal sebagai tokoh utama mengenai ekonomi, dapat dinyatakan dengan rumus berikut ini<sup>63</sup>:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Selain menjadi isu ekonomi, pengangguran juga merupakan permasalahan sosial yang berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Ketika tingkat pengangguran tinggi, hal ini dapat mengakibatkan peningkatan risiko tindakan kriminal, ketidakstabilan sosial, kemiskinan, dan bahkan dapat menciptakan ketidakstabilan politik yang dapat mempengaruhi pemerintah.<sup>64</sup>

## b. Jenis-Jenis Pengangguran

### Pengangguran berdasarkan penyebabnya:<sup>65</sup>

#### 1.) Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional terjadi saat individu beralih antara pekerjaan di pasar tenaga kerja atau ketika mereka memasuki atau keluar dari pasar kerja. Para pencari kerja bukan karena mereka tidak dapat menemukan pekerjaan, tetapi karena mereka sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Sebagai hasilnya,

<sup>63</sup> Trisna, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Implikasinya Di Indonesia", *Jurnal Akademia* 2, no 2 (2018): 245.

<sup>64</sup> Rizky Amalia Nugraheni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), 221.

<sup>65</sup> Lisa Marini dan Novi Tri Putri, "Peluang Terjadinya Pengangguran Di Provinsi Bengkulu: Seberapa Besar?", *Convergence: The Journal of Economic Development* 1, no 2 (2020): 70–83, <<https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10900>>.

mereka mungkin tidak langsung cocok dengan lowongan pekerjaan dan mungkin mengalami periode pengangguran sementara. Pengangguran ini biasanya bersifat sementara dan berlangsung kurang dari satu bulan.

## 2.) Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal atau sering disebut pengangguran siklis terjadi akibat perubahan dalam aktivitas ekonomi selama siklus bisnis. Selama krisis ekonomi, penurunan permintaan barang dan jasa mengikat. Bahkan bisa berkurangnya pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang ingin bekerja. Bisnis yang mengalami penurunan permintaan mungkin mengurangi jumlah pekerja dengan memberhentikan pekerjaan yang ada atau mempekerjakan lebih sedikit pekerja baru. Hal ini membuat masyarakat kesulitan dalam mencari pekerjaan dan menyebabkan pengangguran.<sup>66</sup>

## 3.) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural terjadi ketika terdapat ketidakcocokan antara pekerjaan yang tersedia dan pencari kerja. Ketidakcocokan ini bisa disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang tersedia atau karena pekerjaan tersebut berlokasi jauh dari tempat tinggal pencari kerja. Pekerja dapat mengalami pengangguran jika mereka bekerja di industri yang mengalami penurunan atau jika pekerjaan mereka dapat diotomatisasi akibat kemajuan teknologi.<sup>67</sup> Pengangguran struktural cenderung berlangsung lebih lama dibandingkan dengan jenis pengangguran lainnya karena memerlukan beberapa tahun bagi pekerja untuk mengembangkan keterampilan baru atau mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka.

## 4.) Pengangguran Teknologi

Pengangguran yang disebabkan oleh penggantian tenaga kerja manusia oleh mesin dan teknologi disebut sebagai pengangguran teknologi.<sup>68</sup> Keberlangsungan

---

<sup>66</sup> Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi* (Bandung: Dharma Ilmu, 2017), 222.

<sup>67</sup> Eman, *Perekonomian Indonesia (Suatu Tinjauan Konseptual)* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021).

<sup>68</sup> Sulaiman.

hidup di era digital seperti sekarang harus pintar-pintar dalam mengolah *skill* yang dimiliki, agar kita sebagai individu tidak tergeserkan dengan adanya kecanggihan teknologi.

### **Pengangguran berdasarkan ciri-cirinya:**<sup>69</sup>

- 1.) Pengangguran terbuka, yaitu situasi di mana terdapat lebih banyak pencari kerja daripada jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah individu yang tidak dapat menemukan pekerjaan.
- 2.) Pengangguran tersembunyi, terjadi ketika ada surplus tenaga kerja yang tidak efisien. Dalam hal ini, terdapat lebih banyak tenaga kerja yang digunakan daripada yang sebenarnya diperlukan.
- 3.) Pengangguran musiman, adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan kondisi cuaca. Yang biasanya terjadi pada sektor pertanian dan perikanan. Misalnya, saat musim hujan, para penyadap karet dan nelayan tidak dapat melaksanakan pekerjaan mereka, sementara pada musim kemarau, para petani tidak dapat bekerja diladang mereka.
- 4.) Setengah pengangguran, mengacu pada pekerja yang memiliki pekerjaan, tetapi jam kerjanya terbatas, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu.<sup>70</sup>

### **c. Faktor Penyebab Pengangguran**

Pengangguran adalah suatu permasalahan yang tidak diharapkan, namun menyebar luas di beberapa negara karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurunkan tingkat pengangguran memerlukan kolaborasi antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan lainnya. Berikut adalah beberapa faktor penyebab pengangguran:

---

<sup>69</sup> Lisa Marini dan Novi Tri Putri, "Peluang Terjadinya Pengangguran Di Provinsi Bengkulu: Seberapa Besar?", *Convergence: The Journal of Economic Development* 1, no 2 (2020): 70–83, <<https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10900>>.

<sup>70</sup> Agoes Parera, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020): 34-40.

1. Terbatasnya peluang pekerjaan yang tersedia untuk pencari kerja. Banyaknya pencari kerja jauh melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia.
2. Keterbatasan keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja. Sejumlah besar tenaga kerja tidak memiliki keahlian, yang menjadi salah satu faktor peningkatan tingkat pengangguran di Indonesia.
3. Keterbatasan informasi, di mana pencari kerja kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai perusahaan yang sedang memerlukan tenaga kerja.
4. Ketidakterdistribusian lokasi lapangan pekerjaan, dengan sebagian besar lapangan pekerjaan terkonsentrasi di kota dan sedikit peluang pekerjaan di wilayah pedesaan.
5. Upaya pemerintah yang belum optimal dalam menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.
6. Adanya budaya malas yang menyebar di kalangan pencari kerja, sehingga membuat mereka cenderung mudah putus asa dalam mencari peluang kerja.<sup>71</sup>

#### **d. Dampak Negatif Pengangguran**

##### 1.) Gangguan pada stabilitas perekonomian

Pengangguran struktural dan kronis memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas ekonomi, terutama dalam konteks permintaan dan penawaran agregat.

##### a.) Penurunan permintaan agregat

Individu perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan bekerja, mereka memperoleh penghasilan yang digunakan untuk berbelanja barang dan jasa. Tingkat pengangguran yang tinggi, terutama jika bersifat struktural. Dapat menyebabkan penurunan daya beli, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan permintaan agregat.

##### b.) Penurunan penawaran agregat

Tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat mereduksi penawaran agregat, terutama jika kita mempertimbangkan peran tenaga kerja sebagai

---

<sup>71</sup> Andes Franita, Riska dan audy, "Analisis Pengangguran Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no 1 (2019): 67-70.

faktor produksi utama. Semakin sedikit tenaga kerja yang digunakan, semakin kecil penawaran agregat. Dampak pengangguran pada penawaran agregat lebih terasa dalam jangka panjang karena lamanya pengangguran dapat mengurangi produktivitas dan etika kerja seseorang.

## 2.) Gangguan pada stabilitas sosial politik

Tingkat pengangguran disuatu negara juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik, mengingat pengangguran saat ini telah menjadi isu yang bukan hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan. Dampak sosial dari pengangguran mencakup peningkatan tingkat kriminalitas, termasuk tindakan pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkoba, dan aktivitas ekonomi ilegal.<sup>72</sup>

### e. Pengangguran Menurut Pandangan Islam

Pandangan Islam terhadap pengangguran memang lebih luas dan holistik dibandingkan dengan definisi konvensional dalam ekonomi. Islam menganggap pengangguran tidak hanya sebagai individu yang mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkannya. Dalam perspektif Islam, kerja atau *'amal* mencakup semua aktivitas manusia, baik yang bersiat fisik maupun spiritual, yang bertujuan untuk mencapai atau menambah sesuatu yang diizinkan menurut syariat Islam. Ketika seseorang tidak menggunakan potensinya, itu dianggap sebagai bentuk pengangguran yang berpotensi merugikan dirinya dan masyarakat.

Dalam Al-Qur'an, Allah memberikan peringatan agar umatnya tidak menganggur, dan hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah (2:205):

وَأَذًا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَاسِدَ

Artinya: “Dan apabila (urusan) telah diselesaikan, maka bersabarlah (dengan hukuman Tuhanmu) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu kembali” (QS. Al-Baqarah, 2:205)<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Mandala Rahardja, Prathama dan Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Dan Makro* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2017).

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2019), 296.

Ayat ini menggaris bawahi pentingnya kesabaran dan kerja keras dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika individu bersabar dan aktif dalam melakukan *'amal* (kerja atau aktivitas yang sesuai dengan syariat), mereka akan menemukan jalan keluar dari kesulitan dan masalah yang mungkin mereka alami. Ayat ini memberikan pedoman kepada umat Islam untuk tidak menganggur dan untuk tetap berusaha dalam segala aspek kehidupan.

Jadi, ayat tersebut memberikan dasar hukum Al-Qur'an yang mengingatkan umat Islam tentang pentingnya tidak menganggur dan untuk tetap berusaha dan bersabar dalam menghadapi tantangan, sehingga dapat mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Qadarwi, pengangguran dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Pengangguran *Jabariyah*, yang merujuk pada pengangguran yang tidak memiliki pilihan dan terpaksa menerima status ini. Biasanya terjadi karena individu tersebut tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, yang seharusnya bisa dipelajari sejak usia dini sebagai modal untuk masa depan, atau karena keterampilan yang dimiliki tidak lagi relevan karena perubahan lingkungan atau perkembangan zaman.
- b. Pengangguran *Khiyariyah*, merujuk pada individu yang memilih untuk tidak bekerja padahal pada dasarnya mereka memiliki kemampuan untuk bekerja. Islam lebih fokus memberikan perhatian dan bantuan kepada kelompok pengangguran *Jabariyah*, karena mereka memerlukan dukungan untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, Islam tidak mengalokasikan dana dan bantuan kepada pengangguran *Khiyariyah*, karena pada prinsipnya mereka mampu bekerja, namun mereka memilih untuk tidak memanfaatkan potensinya dan lebih menjadi beban untuk orang lain.

---

<sup>74</sup> Aulia Rahmah, "Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kota Batam", *Skripsi*, (2019): 13.

## f. Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan sangatlah erat. Menurut tokoh Linco Arsyad, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu cenderung berada dalam kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan. Seringkali, mereka yang memiliki pekerjaan dengan upah tetap di sektor pemerintah atau swasta termasuk dalam kelas menengah atas. Orang yang tidak memiliki pekerjaan seringkali dianggap miskin, sedangkan yang bekerja penuh dianggap kaya. Namun, ada juga individu di perkotaan yang mungkin tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikan mereka, dan mereka menolak pekerjaan yang dianggap lebih rendah karena memiliki sumber daya lain yang dapat membantu mereka secara finansial. Meskipun mereka bisa dianggap sebagai penganggur, tidak semua dari mereka adalah miskin. Demikian pula, ada banyak individu yang bekerja penuh waktu di sektor informal tetapi tetap berada dalam kemiskinan.<sup>75</sup>

Tokoh Dian Oktaviani menekankan bahwa sebagian besar rumah tangga di Indonesia sangat bergantung pada pendapatan dari pekerjaan saat ini.<sup>76</sup> Kehilangan pekerjaan dapat mengakibatkan penurunan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lebih lanjut, jika pengangguran terjadi dikalangan masyarakat berpendapatan rendah, terutama mereka yang berada diambang garis kemiskinan, maka pengangguran tersebut dapat dengan mudah menggeser mereka ke dalam kategori masyarakat miskin. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin tinggi juga tingkat kemiskinan.

---

<sup>75</sup> Zaqiah, Triani, and Yeni, "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Jumlah Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia" *Jurnal Kajian Ekonomi Pembangunan* 3, no 4 (2023): 60.

<sup>76</sup> Mandala Rahardja, Prathama dan Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Dan Makro* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2017).

**B. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Marito Ritonga dan Tri Wulantika (2020) "Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara (2010-2018)" <sup>77</sup>	Regresi Linear Berganda.	1. PDRB memiliki dampak negatif dan signifikan pada tingkat kemiskinan di Batu Bara. 2. Jumlah Penduduk secara positif dan signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Batu-Bara.
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup penelitian membahas kemiskinan;</li> <li>2. Penelitian membahas tentang pengaruh PDRB terhadap kemiskinan;</li> <li>3. Metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang "Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Tahun 2010-2018". Sementara, penelitian kali ini meneliti "Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022".</li> </ol>			
2.	Patria Nagara, Misharni, dan Syofria Meidona (2021) "Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di	Regresi Linear Berganda	1. PDRB berdampak positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. 2. Pendidikan tidak memberikan

<sup>77</sup> Ritonga and Wulantika dan Tri Wulantika, Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018)", *Jurnal Diversita* 6, no 1 (2020): 95-102, <<https://doi.org/10.31289/diversita.v6i1.3135>> .

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
	Provinsi Sumatera Barat <sup>78</sup>		dampak positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. 3. Pengangguran berdampak positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup penelitian membahas kemiskinan;</li> <li>2. Penelitian membahas tentang pengaruh PDRB, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan;</li> <li>3. Metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang “Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat”, sementara penelitian kali ini meneliti “Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022”.</li> </ol>			
3.	Muhammad Ricky Darmawan dan Rusdiansyah (2019) “Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Banjarmasin” <sup>79</sup>	Regresi Linear Berganda	1. PDRB secara signifikan berdampak negatif pada tingkat kemiskinan. 2. Pendidikan memiliki dampak negatif yang signifikan pada tingkat kemiskinan.

<sup>78</sup> Patria Nagara dkk, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan", *Klabat Journal of Management* 2, no 2 (2021): 98, <<https://doi.org/10.60090/kjm.v2i2.592.98-122>> .

<sup>79</sup> Darmawan dan Rusdiansyah, "Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Banjarmasin", *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 2, no 4 (2019): 925, <<https://doi.org/10.2052/jiep.v2i4.1229>>.

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
			3. Pengangguran memiliki dampak negatif yang signifikan pada tingkat kemiskinan. 4. Jumlah penduduk memiliki dampak positif yang signifikan pada tingkat kemiskinan. 5. Bersama-sama, variabel-variabel bebas memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kemiskinan.
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup penelitian membahas kemiskinan;</li> <li>2. Penelitian membahas tentang pengaruh PDRB, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan;</li> <li>3. Metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang “Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Banjarmasin”. Sementara, penelitian kali ini meneliti “Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022”.</li> </ol>			
4.	Deswita Adam, Fahrudin Zain Oliling dan Ivan Rahmat Santoso (2022) “Analisis Pengaruh Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kawasan	Regresi Linear Berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan memiliki dampak negatif yang signifikan pada tingkat kemiskinan.</li> <li>2. Tingkat pengangguran berdampak positif</li> </ol>

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
	Kerjasama Utara- Utara <sup>80</sup>		yang signifikan pada tingkat kemiskinan. 3. Keseluruhan variabel bebas secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup penelitian membahas kemiskinan;</li> <li>2. Penelitian membahas tentang pengaruh pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan;</li> <li>3. Metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang “Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kawasan Kerjasama Utara-Utara”. Sementara, penelitian kali ini meneliti “Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022”.</li> </ol>			
5.	Suripto dan Lalu Subayil (2020) “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Periode 2010-2017” <sup>81</sup>	Regresi Linear Berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pendidikan tidak memiliki dampak negatif yang signifikan pada tingkat kemiskinan di Provinsi DIY.</li> <li>2. Pengangguran tidak memiliki dampak positif yang signifikan pada tingkat</li> </ol>

<sup>80</sup> Adam, Olilingo, dan Santoso, Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kawasan Kerjasama Utara-Utara", *Jurnal Ekonomi STIE Muhammadiyah Palopo* 8, no 1 (2020): 97-111, <<https://doi.org/10.35906/jep.v8i1.1039>>.

<sup>81</sup> Suripto dan Subayil, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Periode 2010-2017", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no 2 (2020): 127.

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
			<p>kemiskinan di Provinsi DIY.</p> <p>3. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif yang signifikan pada tingkat kemiskinan di provinsi DIY</p> <p>4. Indeks Pembangunan Manusia memiliki dampak negatif yang signifikan pada tingkat kemiskinan di provinsi DIY.</p>
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup penelitian membahas kemiskinan;</li> <li>2. Penelitian membahas tentang pengaruh pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan;</li> <li>3. Metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM Terhadap Kemiskinan di DIY Tahun 2010-2017”. Sementara, penelitian kali ini meneliti “Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022”.</li> </ol>			
6.	Uray Dian Novita, Nur Istiqamah (2018) “Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap	Regresi Linear Berganda	1. PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
	Kemiskinan di Kabupaten Sambas” <sup>82</sup>		Sambas. 2. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sambas. 3. Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sambas.
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup penelitian membahas kemiskinan;</li> <li>2. Penelitian membahas tentang pengaruh PDRB, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan;</li> <li>3. Metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang “Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sambas”. Sementara, penelitian kali ini meneliti “Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022”.</li> </ol>			
7.	Laga Priseptian dan Wiwin Priana Primadhana (2020) ”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Regresi Linear Berganda	1. Upah Minimum Provinsi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap

<sup>82</sup> Uray Dian Novita dan Nur Istiqamah, "Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sambas", *Jurnal Manajemen Motivasi* 13, no 1 (2018): 815 <<https://doi.org/10.29406/jmm.v13i1.539>>.

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
	Kemiskinan di Jawa Timur <sup>83</sup>		kemiskinan. 2. Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 3. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. 4. Pengangguran memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan. 5. Secara simultan seluruh variabel bebas mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur.
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup penelitian membahas kemiskinan;</li> <li>2. Penelitian membahas tentang pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan;</li> <li>3. Metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Timur”. Sementara, penelitian kali ini meneliti “Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022”.</li> </ol>			

<sup>83</sup> Priseptian, Laga dan Primandhana, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Timur, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 3, no 1 (2022): 24.

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
8.	Matthew Nico Vendison, dkk (2022) "Pengaruh Tenaga Kerja, Pendidikan, PDRB, Konsumsi, dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 2017-2019". <sup>84</sup>	Regresi Linear Berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga kerja mempengaruhi kemiskinan di Sumut selama tahun 2017-2019.</li> <li>2. Pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Sumut selama tahun 2017-2019.</li> <li>3. PDRB secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di Sumut periode 2017-2019.</li> <li>4. Konsumsi dan Investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Sumut selama tahun 2017-2019.</li> </ol>
<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup penelitian membahas kemiskinan;</li> <li>2. Penelitian membahas tentang pengaruh PDRB dan pendidikan terhadap kemiskinan;</li> <li>3. Metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan alat analisis Regresi Linear Berganda.</li> </ol> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang "Pengaruh Tenaga</li> </ol>			

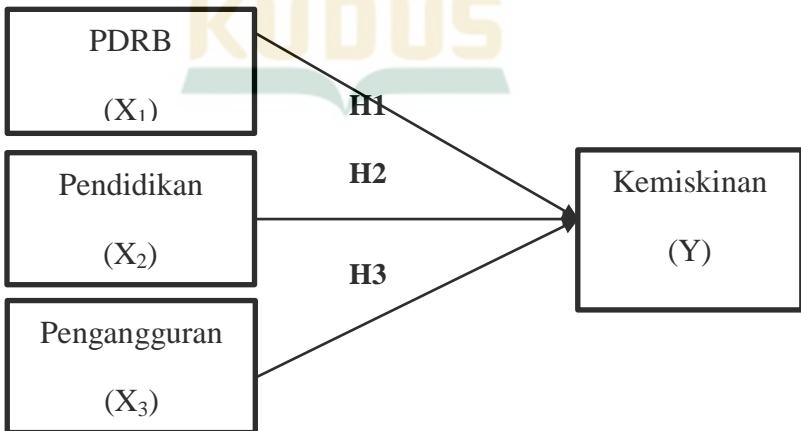
<sup>84</sup> Matthew. dkk Vendison, "Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Konsumsi, Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara", *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3, no 4 (2022): 53-58.

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode	Hasil Penelitian
	Kerja, Pendidikan, PDRB, Konsumsi, dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 2017-2019”. Sementara, penelitian kali ini meneliti “Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022”.		

**C. Kerangka Berfikir**

Kerangka pemikiran penelitian ini menekankan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu adalah pertumbuhan ekonomi (PDRB), tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran. Ketiga variabel ini dianggap sebagai faktor independen, sementara kemiskinan dianggap sebagai faktor dependen. Melalui analisis tingkat signifikansi dari setiap variabel independen, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait tentang penyebab kemiskinan di wilayah tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merancang langkah-langkah yang efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, kerangka pemikiran ini memiliki tujuan untuk memberikan wawasan yang bermanfaat bagi upaya mengatasi masalah kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu.

**Gambar 2. 1  
Kerangka Berpikir**



Gambar 2.1 menunjukkan kerangka berpikir penelitian ini, menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak PDRB, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu dalam rentang waktu 2018-2022. Fokus pertanyaan penelitian mencakup sejauh mana PDRB berperan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut selama periode tersebut, apakah tingkat pendidikan memiliki signifikansi terkait tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu pada periode yang sama, dan apakah tingkat pengangguran juga memiliki dampak pada tingkat kemiskinan di wilayah tersebut selama rentang waktu tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan permasalahan penelitian. Perumusan masalah penelitian umumnya berbentuk pertanyaan, dan hipotesis memberikan jawaban awal yang didasarkan pada teori yang relevan, sebelum data empiris dikumpulkan. Hipotesis dapat dianggap sebagai sebuah dugaan yang dapat terbukti benar atau salah melalui bukti empiris yang diperoleh selama penelitian.<sup>85</sup> Dalam konteks penelitian ini, hipotesis digunakan sebagai panduan bagi penelitian yang sedang dilakukan. Jika hipotesis terbukti salah, maka hal ini dapat membantu dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.<sup>86</sup> Berikut adalah hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini:

##### **1.) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan**

Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak pada perkembangan suatu negara, dan oleh karena itu, PDRB yang lebih tinggi dalam suatu wilayah cenderung mengurangi

---

<sup>85</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2017): 120.

<sup>86</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2019), 65.

tingkat kemiskinan penduduk.<sup>87</sup> PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi karena menunjukkan peningkatan dalam produksi barang dan jasa di masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selain itu, data PDRB adalah indikator penting untuk menilai kondisi ekonomi suatu wilayah selama periode tertentu. Nilai PDRB mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada, serta dapat memberikan gambaran sejauh mana pembangunan telah berhasil dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam hal pemerataan pendapatan.<sup>88</sup> Seperti halnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Patria Nagara, Misharni, dan Syofria Meidona tentang “Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat”, yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.<sup>89</sup> Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
 H1 = Diduga bahwa ada pengaruh PDRB secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu tahun 2018-2022.

## 2.) Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan

Menurut Simmons, peran pendidikan sangat penting dalam melawan kemiskinan dan juga merupakan tujuan utama dalam pembangunan. Pendidikan memiliki fungsi kunci dalam membantu suatu negara untuk mengadopsi teknologi modern dan meningkatkan kapasitasnya untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.<sup>90</sup> Pendidikan, baik yang bersifat formal maupun nonformal, memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Hal ini dapat terjadi baik

---

<sup>87</sup> Dewi Margaretha, Diky Syamhenri, dan Shopia Amanda, “Analisis PDRB & Pengangguran Terhadap Mempengaruhi Kemiskinan di Riau Tahun 2012-2021,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 54-76.

<sup>88</sup> Abdul Rahman Sulaeman dan Abdurrozzaq Hasibuan, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan Di Kota Padangsidimpuan,” *Buletin Utama Teknik* 17, no. 1 (2021): 76.

<sup>89</sup> Patria Nagara dkk, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan”, *Klabat Journal of Management* 2, no 2 (2021): 98, <<https://doi.org/10.60090/kjm.v2i2.592.98-122>> ..

<sup>90</sup> Michael Todaro dan Stephen Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2018): 45-55.

secara tidak langsung, dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung, dengan memberikan pelatihan kepada kelompok miskin agar mereka memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka.<sup>91</sup> Seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Suropto dan Lalu Subayil dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Periode 2010-2017”, yang menyatakan bahwa pendidikan memiliki dampak positif yang signifikan pada tingkat kemiskinan di Provinsi DIY.<sup>92</sup> Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 = Diduga bahwa ada pengaruh Pendidikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu tahun 2018-2022.

### 3.) Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Pengangguran merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu, atau sedang mencari pekerjaan yang sesuai.<sup>93</sup> Dampak negatif pengangguran terhadap kemiskinan, seperti yang diungkapkan oleh Sukirno, adalah menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat karena kurangnya kesempatan kerja, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang sudah diraih seseorang. Kesejahteraan masyarakat akan semakin menurun karena pengangguran meningkatkan resiko terperangkap dalam kemiskinan akibat kurangnya pendapatan.<sup>94</sup> Ini dikarenakan orang yang menganggur tidak memiliki pekerjaan yang memberikan gaji atau upah, yang biasanya digunakan untuk memnuhi kebutuhan hidup.

---

<sup>91</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima (Yogyakarta: STIE-YKPN, 2019): 113.

<sup>92</sup> Suropto dan Subayil, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Periode 2010-2017", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 1, no 2 (2020): 127..

<sup>93</sup> Marini L dan Putri N. T, “Peluang Terjadinya pengangguran di Provinsi Bengkulu: Seberapa Besar?” *The Journal of Economic Development* 1, no. 2 (2020): 112.

<sup>94</sup> Rezeki Mardiatillah, Maya Panorama, dan Rinol Sumantri, “Pengaruh Pengangguran dan Inflansi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2015-2019,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 18, no. 2 (2021): 34.

Kondisi pengangguran lebih sering terjadi di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah, sehingga mereka cenderung hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>95</sup> Seperti halnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Patria Nagara, Misharni, dan Syofria Meidona tentang “Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat”, yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.<sup>96</sup> Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 = Diduga bahwa ada pengaruh Pengangguran secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Kedu tahun 2018-2022.



---

<sup>95</sup> Batara Daniel Bagana dan Widhian Hardiyanti, “Pengaruh Pengangguran Dan PDRB Sebagai Penyumbang Masalah Kemiskinan Di Kota Besar. Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi.” *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Ekonomi* 20, no. 01 (2023): 45.

<sup>96</sup> Nagara.